BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan internet yang cukup pesat secara signifikan telah mempengaruhi cara perusahaan dalam melaksanakan aktivitas pelaporan bisnis dan praktik akuntansi. Internet memiliki beberapa karakteristik dan keunggulan dalam pengungkapan informasi secara keseluruhan antara lain bersifat *pervasiveness*, tidak mengenal batas, komunikasi tepat waktu, dan berbiaya rendah. Saat ini, internet telah menjadi alat bagi perusahaan sebagai media komunikasi dengan investor tidak terkecuali bagi BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Yudiastri (2015) menyatakan dalam UU No. 14 Tahun 2008 dijelaskan alasan kebijakan publik dapat memengaruhi hajat hidup orang banyak, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 3 (e) UU No. 14 Tahun 2008 bahwa unsur penting dari keterbukaan informasi ini adalah berkaitan dengan kepentingan publik maupun memengaruhi hajat hidup orang banyak. Dengan fenomena tersebut perusahaan mulai melaporkan segala informasi yang berkaitan dengan bisnis mereka pada halaman web perusahaan, tidak terkecuali perusahaan BUMN.

Internet Financial Reporting (IFR) merupakan laporan keuangan perusahaan publik yang diterbitkan melalui *website* masing-masing perusahaan publik. IFR merupakan salah satu pengungkapan sukarela dikarenakan belum ada regulasi yang mengatur konten informasi apa saja yang harus disajikan di

dalam *website* perusahaan (Almilia, 2009). *Website* dipilih karena memilikibanyak keunggulan, salah satunya adalah kemudahan akses pengguna dengan biaya yang lebih murah dan dapat dilakukan dimana saja. Hal tersebut tentunya menjadi daya tarik mengapa pelaporan keuangan oleh setiap perusahaan BUMN harus dipublikasikan melalui *website* perusahaan BUMN. IFR juga dipertimbangkan akan menghasilkan dampak positif, khususnya bagi transparansi perusahaan BUMN pada publik/pengguna *website*, memperoleh saran-saran perbaikan, kemudahan mengakses informasi perusahaan, dan dapat mencegah praktik penyimpangan pada setiap perusahaan BUMN.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modal dimiliki Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (APBN). BUMN memiliki peran yang sangat penting bagi pemerintah maupun masyarakat, dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara pasal 2 telah disebutkan maksud dan tujuan dari pendirian BUMN adalah memberikan sumbangan bagi perkembangan nasional dan penerimaan Negara, mengejar keuntungan, menyelenggarakan pemanfaatan umum berupa penyediaan barang/jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, serta turun aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Perusahaan BUMN yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) juga berperan dalam menyelenggarakan pelayanan publik, seperti halnya melaksanakan penugasan pemerintah melalui mekanisme

Public Service Obligation (PSO) yaitu penyaluran komoditas bersubsidi yang ditugaskan ke BUMN adalah : (1) BBM tertentu (premium, minyak tanah, solar, dan LPG oleh PT. Pertamina, (2) listrik oleh PT. PLN, (3) pupuk oleh PT. Pupuk Indonesia, (4) beras untuk rakyat miskin oleh Perum Bulog, (5) benih oleh PT. Pertani. Selain itu BUMN juga ditugaskan sebagai penyedia sarana angkutan bersubsidi seperti angkutan penumpang laut kelas ekonomi oleh PT.Pelni, angkutan kereta api kelas ekonomi oleh PT. Kereta Api Indonesia. Dalam hal pemberi jasa layanan publik kementrian BUMN menugaskan Perum LKBN Antara untuk menyediakan berita kepada publik dan PT. Pos Indonesia yang melakukan kewajiban distribusi surat ke seluruh wilayah Indonesia.

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah BUMN di Indonesia

	2010	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
BUMN yang terdaftar di BEI	17	18	18	20	20
BUMN yang tidak terdaftar di BEI	111	109	108	105	85
Perum (Perusahaan Umum)	14	14	14	14	14
Total BUMN	**142**	**141**	**140**	**139**	**119**
Perusahaan Pemerintah dengan Kepemilikan Minoritas	18	18	13	12	24

Sumber : bumn.go.id

Tabel 1.1 menunjukkan perkembangan jumlah BUMN di Indonesia sejak tahun 2010 sampai dengan 2014. Saat ini terdapat 119 perusahaan BUMN yang dikuasai pemerintah dan mempunyai kepemilikan minoritas sebanyak 24 perusahaan, jumlah BUMN per 31 Desember 2014 berkurang sebanyak 20

BUMN dibandingkan akhir tahun 2013. Hal ini dikarenakan 2 BUMN telah berubah status hukum menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yaitu PT. Askes (PT. Asuransi Kesehatan) dan PT. Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja), 14 BUMN perkebunan telah menjadi Holding BUMN Perkebunan sehingga jumlah BUMN Perkebunan berkurang menjadi 13 perusahaan, dan 6 BUMN Kehutanan sudah menjadi 1 Holding Kehutanan sehingga jumlah BUMN berkurang sebanyak 5 perusahaan. Pada akhir tahun 2014 perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebanyak 20 perusahaan, sedangkan BUMN yang tidak terdaftar di BEI sebanyak 85 dan yang termasuk dalam Perum sebanyak 14 perusahaan.

Peraturan yang terdapat pada pasar modal telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). Dalam Keputusan Ketua Bapepam – LK No. Kep- 431/BL/2012 dalam pasal (3) tentang *website* emiten atau perusahaan publik yang menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik yang telah memiliki halaman *website* sebelum berlakunya peraturan tersebut, maka wajib memuat laporan keuangan tahunan pada halaman *website* masing-masing perusahaan. Bagi emiten atau perusahaan publik yang belum memiliki halaman *website*, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya peraturan tersebut, emiten atau perusahaan publik yang dimaksud wajib memiliki laman *(website)* yang memuat laporan keuangan tahunan. Peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2015 yang mengatur tentang situs web emiten atau perusahaan publik. Dalam pasal 6 disebutkan bahwa informasi yang wajib dimuat dalam web emiten atau

perusahaan publik harus memuat 4 informasi penting yaitu informasi umum emiten atau perusahaan public, informasi untuk pemodal (investor), informasi tata kelola perusahaan, dan informasi tanggungjawab sosial perusahaan

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 pasal 14 telah menyebutkan beberapa informasi publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara harus memuat informasi keuangan dan informasi *Non* keuangan. Informasi keuangan yang harus dimuat dalam *website* perusahaan seperti laporan tahunan, laporan keuangan, dan neraca yang telah diaudit. Informasi Non keuangan yang harus terdapat di *website* seperti informasi tentang gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, informasi lembaga pemeringkat kredit/lainnya, informasi penggantian akuntan dan mekanisme tata kelola perusahaan.

BUMN juga memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung kepada ekonomi nasional setiap tahunnya, potensi BUMN kepada sumbangsih terutama terhadap penerimaan negara dibagi menjadi dua jenis, yaitu kontribusi langsung dan tidak langsung. Kontribusi langsung berupa dividen, CAPEX, pajak dan dana privatisasi, sedangkan kontribusi tidak langsung berupa belanja modal atau investasi (CAPEX), belanja operasional (opex), kapitalisasi pasar BUMN terbuka dipasar modal, program kemitraan dan bina lingkungan dan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR).

Gambar 1.1 menunjukkan realisasi dividen BUMN ke penerimaan Negara pada tahun 2015 yang berdasarkan data IHPS 2015. Berikut akan

diuraikan lebih jelas mengenai realisasi dividen pada perusahaan BUMN di Indoensia tahun 2015:

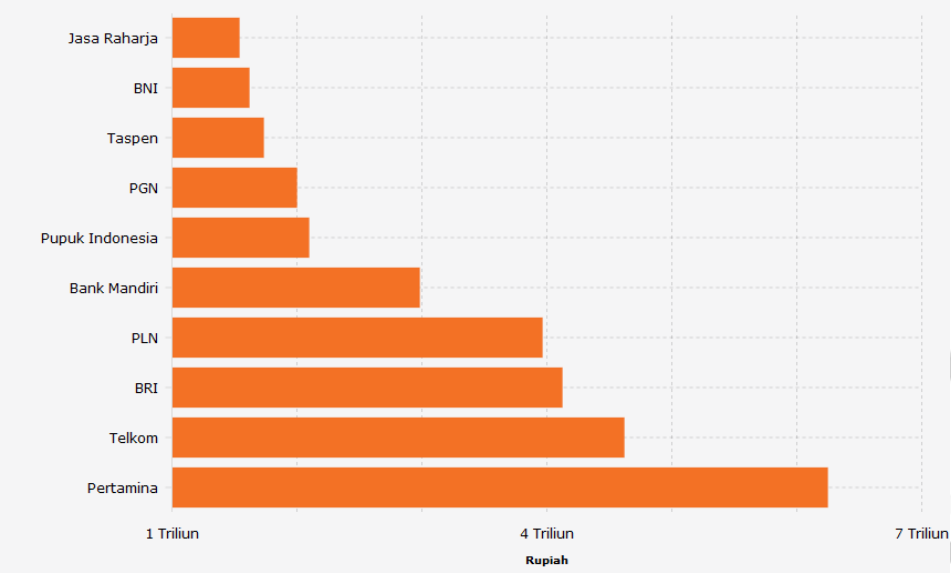

Sumber : IHPS 2015 (Website Resmi Kementrian BUMN)

Gambar 1.1
Realisasi Dividen BUMN ke Penerimaan Negara 2015

Kontribusi BUMN pada penerimaan negara pada tahun 2015 mengalami peningkatan, hal ini diungkapkan dalam laporan kinerja BUMN tahun 2015. Realisasi penerimaan negara tahun 2015 bukanlah dari BUMN yang terdaftar di BEI, melainkan perusahaan BUMN yang tidak terdaftar di pasar modal. Pertamina menjadi perusahaan yang melakukan sumbangsih terbesar atas penerimaan negara seperti halnya pada perusahaan Telkom, PLN, Pupuk Indonesia, PGN, Taspen dan Jasa Raharja. Hal ini membuktikan bahwa BUMN yang non *Listed* juga memberikan peran yang sangat besar bagi penerimaan negara Indonesia dan memiliki potensi yang besar untuk menjalin sinergi.

Penelitian Botti (2014) yang menguji tingkat efisiensi *corporate governance* dan IFR menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan kualitas penyampaian informasi kepada *stakeholders* dapat dilakukan dengan cara melakukan peningkatan atas pengungkapan IFR. Botti (2014) menyatakan bahwa *content* dan *presentation* menjadi hal yang penting dalam pengukuran kualitas IFR. Botti (2014) mengukur kualitas IFR yang menggunakan 2 proksi indeks IFR yaitu *Content* dan *Presentation*, IFR *Content* adalah informasi umum yang disajikan untuk *stakeholders* sedangkan IFR *Presentation* merupakan format dalam penyajian IFR untuk mendukung *Content* yang terdapat pada *website* perusahaan. Penelitian yang akan dilakukan menggunakan empat kategori skor untuk mengukur indeks IFR yang sebelumnya pernah diteliti, penelitian yang sejenis yaitu dilakukan oleh Almilia (2009) dan Botti *et al* (2014) menggunakan empat kategori skor untuk mengukur indeks IFR yang terdiri dari *Content, Timeliness, Technology Used dan User support*.

Penelitian ini menarik untuk diteliti dengan tujuan untuk meneliti apakah perusahaan BUMN di Indonesia juga menyampaikan informasi keuangan dan Non keuangannya secara *real time* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang telah ditetapkan sebelumnya bahwa informasi publik harus dapat diperoleh setiap pengguna informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Penelitian ini mendeskripsikan penyajian informasi keuangan dan non keuangan antar BUMN *Non Listed* di Indonesia. Fokus sampel BUMN Non *Listed* dilatarbelakangi oleh fenomena yang terjadi

bahwa adanya kesenjangan informasi pada BUMN Non *Listed* dan penerapan IFR pada perusahaan BUMN Non *Listed*.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

"Analisis Penyajian Informasi Keuangan dan Non Keuangan Pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia".

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di dalam latar belakang, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penyajian *content* pada masing – masing *website* perusahaan BUMN Non *Listed*?
2. Bagaimana penerapan *timeliness* pada masing – masing *website* perusahaan BUMN Non *Listed*?
3. Bagaimana penggunaan *technology used* pada masing – masing *website* perusahaan BUMN Non *Listed*?
4. Bagaimana penerapan *user support* pada masing – masing *website* perusahaan BUMN Non *Listed*?
5. Bagaimana penyajian informasi non keuangan UU-KIP pada masing – masing *website* perusahaan BUMN Non *Listed*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan penyajian informasi keuangan dan non keuangan antar perusahaan BUMN

Non *Listed* terkait dengan penyajian *Internet Financial Reporting* dan Undang – Undang No 14 Tahun 2008.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Bagi Peneliti.

   Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk melengkapi penelitian yang sebelumnya, dan bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjadi referensi dan bermanfaat pada penelitian yang sejenis.

2. Bagi Perusahaan.

   Penelitian ini diharapkan agar perusahaan dapat lebih terpacu untuk memanfaatkan *Internet Financial Reporting* dalam pelaporan keuangan tahunan yang dapat menjalin komunikasi baik dengan pihak – pihak yang berkepentingan dan menciptakan transparansi penyajian informasi keuangan maupun Non keuangan terkait dengan kinerja perusahaan BUMN bagi publik.

3. Bagi Pemerintah

   Penelitian ini diharapkan agar pemerintah dapat melakukan penerapan keterbukaan informasi publik sesuai peraturan Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 dalam lingkup perusahaan BUMN, khususnya yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) agar masyarakat dapat mengetahui secara mudah dan cepat tentang kinerja BUMN yang tidak terdaftar di BEI.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti membahas mengenai penjelasan dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini peneliti membahas mengenai penjelasan penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti membahas mengenai penjelasan Rancangan Penelitian, Batasan Penelitian, Identifikasi Variabel, Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel, Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel, Data dan Metode Pengumpulan data serta Teknik Analisis Data.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN & ANALISIS DATA

Dalam bab ini peneliti menguraikan tentang hal – hal terkait mengenai subyek penelitian, analisis deskriptif, dan pembahasan terkait dengan penelitian yang dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini peneliti menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran yang dapat diberikan mengenai penelitisn ini.